

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGELOLAAN PAMSIMAS DI DESA BANGLAS BARAT
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI**

Abstract

This research is motivated target PAMSIMAS village election in the village of Banglas Barat years 2014-2016 in accordance with the decree of the minister of public works decree No. 79 / Kpts / DC / 2013 on stipulation district / city target PAMSIMAS. Implementers program PAMSIMAS at the district level conducted by the planning office and the department of public health office of human settlements POKJA AMPL is incorporated in regency Kepulauan Meranti, while implementers at the village level is done by the village government, KKM, SATLAK, BPSPAMS and community facilitator team. The research directs the factors that influence the management of the PAMSIMAS program. Research to know the factors that influence the management of PAMSIMAS program. The type used in this research is descriptive research with qualitative research approach. Type of research data is primary data and secondary data. Data collection techniques in this study is documentation and interviews. Technical analysis of the data used is descriptive qualitative data analysis. The result of the research shows that there are several factors that influence the management of PAMSIMAS in terms of the content of the benefit factor policy and the degree of change to be achieved which is still a constraint, while in terms of policy environment the role of Village Government and Local Government is still minimal in doing support in terms of material as well development of PAMSIMAS facilities that have not been able to reach all PAMSIMAS beneficiaries.

Keyword : policy implementation, management PAMSIMAS

***Sukarman, Baskoro Wicaksono**

***Adalah Mahasiswa dan Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau**

PENDAHULUAN

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah), untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan menciptakan perilaku hidup bersih melalui promosi kesehatan lingkungan dan penyediaan prasarana / sarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi untuk mencapai MDG's, maka

program PAMSIMAS dilanjutkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Program PAMSIMAS dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan yaitu (1) Air Bersih untuk Rakyat, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia melakukan dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan dan terisolir sehingga di tunjuk untuk pelaksanaan

bidang teknis program PAMSIMAS yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM). Dalam melakukan percepatan terhadap pencapaian target yang telah ditentukan, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI) No. 852 Tahun 2008 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang kemudian terus disesuaikan dengan kondisi di masyarakat maka dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Pelaksanaan PAMSIMAS adalah program yang dikeluarkan oleh Kementerian PU dan pelaksanaan di daerah Dinas PU Cipta Karya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan program PAMSIMAS tersebut. Dinas PU Cipta Karya sendiri tentunya sebagai pelaksana pembangunan secara fisik bangunan penampungan air sanitasi berbasis masyarakat dan Puskesmas sendiri dibawah pengawasan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan untuk merubah kebiasaan dan perilaku masyarakatnya melalui kegiatan pemicu bukan dari fisik dalam pembangunannya seperti yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.

Pemilihan kabupaten/kota sasaran dilakukan oleh Pemerintah sedangkan pemilihan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Untuk keberlanjutan pengembangan sektor air minum dan sanitasi maka diterbitkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 14/HK/KPTS/2016 perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 164 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL).

Program PAMSIMAS diperuntukan bagi masyarakat miskin pedesaan, banyak masyarakat

miskin di pedesaan yang belum mendapatkan air bersih yang layak. Selain itu masyarakat di wilayah pinggiran kota (*peri-urban*) yang mana masyarakatnya berpenghasilan rendah, pemukiman dan lingkungannya rawan serta tidak/belum tersedianya sarana sanitasi yang layak. Melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), pemerintah berupaya untuk:

1. jumlah masyarakat pedesaan dan peri-urban untuk mendapatkan akses air minum, kesehatan dan sanitasi
2. Mengurangi jumlah penduduk terserang penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan
3. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan maupun penanganan pasca program.

Program PAMSIMAS pada tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan 5 desa yang mendapatkan Program Nasional Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di antaranya Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu, Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi, Desa Topang Kecamatan Rangsang serta Desa Batang Malas dan Desa Alai Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Kabupaten Meranti mendapatkan alokasi desa sasaran dari APBN sebanyak 4 (empat) desa dan alokasi desa sasaran dari APBD Kabupaten sebanyak 1 (satu) desa. Realisasi proyek ini meninjau pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor : 79/KTPS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/kota Sasaran Program Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

Fokus pada penelitian ini adalah Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Realisasi dari Rencana Kerja Masyarakat (RKM) telah sesuai dengan perencanaan berdasarkan profil masing-masing desa sasaran PAMSIMAS. Dalam menentukan dan merencanakan pembangunan di

Hasil Penelitian

Desa Banglas Barat ini dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui identifikasi masalah dengan melibatkan masyarakat disertai bimbingan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) yang terdiri dari tiga orang dengan bidang yang berbeda-beda satu orang Fasilitator bidang Teknik yang mendampingi dalam perencanaan dan pembangunan fisik sarana air minum dan sanitasi, satu orang Fasilitator bidang Pemberdayaan yang mendampingi masyarakat di bidang kelembagaan dan penguatan pada masyarakat, dan Fasilitator bidang STBM yang bekerja mendampingi masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dalam identifikasi masalah dan analisis situasi ditemukan data mengenai jumlah penduduk dan akses air minum dan sanitasi masyarakat Desa Banglas Barat:

Tabel 1 Jumlah Penduduk Dan Akses Terhadap Sanitasi Dan Sarana Air Minum

No	Dusun	Rumah Tangga (KK)	Rumah Tangga yang mempunyai akses awal (KK)	
			Air minum	Sarana sanitasi
1	Rintis	346	245	265
2	Perumbi	330	353	427
3	Bandar Suir	280	98	-
4	Semulut	85	23	-
Total		1.041	719	629

Sumber: Rencana kerja masyarakat pamsimas, 2014

Kondisi sarana sanitasi masyarakat Desa Banglas masih sangat minim di beberapa dusun untuk itu diperlukan peningkatan. Sanitasi berupa segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan memutuskan mata rantai kuman dari sumber penularannya serta pengendalian lingkungan. STBM memiliki indikator *outcome* yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan, dan indikator *output* mewujudkan masyarakat yang bebas dari buang air di sembarang tempat (ODF), mencuci tangan

pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga dan pengamanan limbah cair rumah tangga.

Pengelolaan PAMSIMAS di Desa Banglas Barat terdapat Lembaga kemasyarakatan yang ikut serta sebagai perpanjangan tangan masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat yakni KKM, SATLAK, dan BPSPAMS. Prosedur pelaksanaan program PAMSIMAS banyak tahapan-tahapan yang melibatkan masyarakat baik dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Semua prosedur dalam pelaksanaan PAMSIMAS akan diselenggarakan oleh KKM dan Satuan Pelaksana (SATLAK) yang mana sebagai perwakilan masyarakat Desa Banglas Barat. Kegiatan yang dilaksanakan KKM dan SATLAK akan di damping oleh Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) agar setelah program ini selesai masyarakat dapat mandiri dalam mengelola sarana yang dimilikinya. Mulai dari penyelenggaraan administrasi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Pengelolaan program PAMSIMAS berbasis masyarakat artinya masyarakat di tuntut untuk berperan penting dan pengelola yang dibentuk dari masyarakat serta instusi pemerintahan baik di tingkat desa maupun daerah harus bisa saling untuk bekerjasama, sehingga dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan transparansi akan setiap kegiatan serta pertanggung jawaban dari pengelola harus sesuai dengan peraturan yang telah di sepakati. Desa Banglas Barat telah melaksanakan program PAMSIMAS, untuk itu pengelola di tuntut dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan program.

Kondisi Buang air besar menggunakan jamban tidak standar kesehatan dan buang air besar sembarangan adalah salah satu kebiasaan yang masih ada di masyarakat Desa Banglas Barat untuk itu harus dilakukan kegiatan pemicu dengan mengali kesadaran masyarakat untuk berperilaku dan praktik hidup bersih dan sehat (PHBS). Program PAMSIMAS ini tidak hanya berfokus

pada pembangunan sarana saja tapi pembangunan yang berbasis pada manusia artinya membangun manusia yang ada di Desa Banglas Barat melalui Pelatihan dan Promosi kesehatan (Promkes) yang menjadikan masyarakat sebagai peserta pelatihan. Pelatihan yang dilaksanakan di Desa Banglas Barat antara lain : pelatihan organisasi dan manajemen keuangan, pelatihan teknis, dan pelatihan PHBS, serta promosi kesehatan.

Program PAMSIMAS berupaya untuk lebih meningkatkan jumlah pemanfaat penerima PAMSIMAS ini dengan meningkatkan jumlah penerima manfaat dengan menambah sambungan PVC (Pipa) agar penyakit lingkungan yang berhubungan dengan air seperti diare dapat mengalami penurunan. Masyarakat Desa Banglas Barat dalam program PAMSIMAS dituntut untuk berkontribusi sebesar 20% dari total dana yang disalurkan pemerintah. Kontribusi 20% terdiri dari 4% dana *in cash* (tunai) dan 16% dana sumbangan masyarakat berupa bahan material maupun non materi berupa tenaga (gotong royong). Dana PAMSIMAS di Desa Banglas Barat berasal dari APBN Rp 228.000.000, Kontribusi Masyarakat (*In-Cash*) sebesar Rp 11.400.000 dan Kontribusi Masyarakat (*In-Kind*) 45.600.000 total anggaran Rp 285.000.000.

Desa Banglas Barat memiliki permasalahan yang lebih spesifik dimana sarana air minum dimana sumber air bersih sangat minim, keruh, kering pada musim kemarau dan untuk air bersih hanya berasal dari bak penampungan. Dan dari segi sanitasi masih banyak masyarakat miskin khususnya yang menggunakan jamban sederhana yang bisa dikatakan belum sehat dan perilaku kesehatan masyarakat miskin yang buang air sembarangan, hal ini tentunya merupakan tantangan dalam pelaksanaan PAMSIMAS.

Kondisi Desa Banglas Barat dengan rendahnya akses sarana air minum dan sanitasi membuat pengelola PAMSIMAS untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan program PAMSIMAS di Banglas Barat diharapkan meningkatkan perilaku hidup sehat, stop buang air besar sembarangan, penguatan bagi

pemerintah lokal, akses pelayanan sarana air minum dan sanitasi, namun dari pelaksanaan program PAMSIMAS ini malah menimbulkan permasalahan lain diantaranya :

1. Buruknya pengelolaan sarana PAMSIMAS, setelah beberapa bulan peresmian sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat di dusun rintis, yang sulit mendapatkan air karena banyak sambungan PVC di dusun rintis yang rusak dan fasilitas lainnya yang dipastikan tidak bisa digunakan lagi sehingga berdampak pada kebiasaan masyarakat seperti tidak mencuci tangan pakai sabun kembali dilakukan, BABS sehingga kondisi kesehatan masyarakat tidak ada peningkatan kualitas hidup.
2. Kurangnya kegiatan rutin untuk melaksanakan pemantauan tingkat kesadaran sanitasi dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk sekolah yang menjadi sasaran dan masyarakat, serta juga pelatihan organisasi dan manajemen keuangan, pelatihan teknis dimana kegiatan ini hanya dilakukan sekali sehingga tidak berdampak pada kehidupan masyarakat

RUMUSAN MASALAH

Program Pamsimas di desa Banglas Barat banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat kondisi masyarakat tidak mampu meningkatkan perilaku hidup sehat, stop buang air besar sembarangan, meningkatkan kelembagaan lokal serta pelayanan air minum dan. Sehingga dapat di tarik pertanyaan penelitian yaitu :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan PAMSIMAS di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti?

KERANGKA TEORI

a. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses

kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana sebagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran(*output*) maupun sebagai suatu dampak(*outcome*). (Winarno,2012)

Menurut Grindle (Nugroho,2004), implementasi sebagai rangkaian antara tujuan kebijakan dan hasil-hasil kegiatan pemerintah, karena itu implementasi kebijakan membutuhkan adanya sistem pelaksanaan kebijakan cara yang diterjemahkan kedalam tindakan-tindakan program untuk mencapai tujuan akhir seperti yang ditetapkan oleh kebijakan. Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses Implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah.(Al-ikhlas,2014)

Grindle juga menyatakan bahwa implementasi pada dasarnya merupakan upaya menerjemahkan kebijakan publik yang merupakan pernyataan luas tentang maksud, tujuan dan cara mencapai tujuan kedalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dengan demikian, implementasi berhubungan dengan penciptaan "*policy delivery sytem*" yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan output atau outcomes tertentu.

Menurut Grindle dalam sujianto mengarahkan implementasi kebijakan bukan sekedar hubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu yaitu menyangkut masalah

konflik, keputusan, dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. (Sujianto,2008) Grindle dalam sujianto mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi,yaitu

1. Kejelasan tujuan-tujuan program dan tingkat consensus diantara pelaksana atas tujuan-tujuan tersebut
2. Tingkat perubahan dari kebiasaan-kebiasaan lama yang dikehendaki program
3. Tipe-tipe orang yang memperoleh manfaat dan klien terbatas yaitu orang dan kelompok yang menjadi target implementasi

Menurut Gindle bahwa berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan tersebut di tentukan oleh dua variable yaitu "*content of policy*"(isi kebijakan) dan variable "*context of policy*"(lingkungan kebijakan). Variable isi kebijakan mencakup yaitu:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran dan target group termuat dalam isi kebijakan
2. Jenis dan manfaat yang diterima oleh target group
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan
4. Apakah letakan sebuah program sudah tepat
5. Siapa pelaksana program
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai

Sedangkan variable lingkungan kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Dari isi kebijakan konteks tersebut Grindle dalam nawawi dijelaskan:

1. *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Berkaitan dengan berbagai pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya

2. *Type of Benefit* (tipe manfaat)

Isi kebijakan berupaya untuk menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan

3. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak ingin dicapai, isi kebijakan menjelaskan pada point ini adalah seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan dalam skala yang sangat jelas

4. *Sile of Dicision making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan di implementasikan

5. *Program Implementer* (pelaksanaan program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan

6. *Resources Committed* (sumberdaya yang harus digunakan)

Dalam menjalankan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan baik

Sedangkan lingkungan kebijakan menurut Grindle mencakup :

1. *Power, interest, and strategis of actor involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari actor-aktor terlibat). Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan

dan kekuasaan kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancarkan jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang maka sangat besar kemungkinan program yang hendak dijalankan berhasil

2. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim berkuasa). Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan, maka pada bagian karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan

3. *Compliance and Responsiveness* (pemenuhan dan daya tanggap). Hal ini yang dirasakan penting dalam proses pelaksanaan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada point ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.(Ansem Strauss & Juliet Corbin,2013) Menurut Jhon SW. Creswell mendefenisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata -kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.(Hamid Patiliam,2011) Dalam pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi dan angka-angka (sensus, misalnya). Data dianalisis untuk dijadikan bukti-bukti yang perlu diinterpretasi untuk mendukung kebenaran dari hipotesa/proposisi yang digunakan dalam penelitian.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran mengenai sejauhmana pengaruh program PAMSIMAS di desa banglas barat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat(PAMSIMAS) di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2015. Pemilihan lokasi penelitian ini karena pertimbangan bahwa Program PAMSIMAS yang telah di laksanakan menimbulkan beberapa permasalahan sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari Program PAMSIMAS dan menimbulkan konflik di masyarakat.

D. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian, maka diadakan wawancara langsung dengan informan penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Terkait program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Banglas Barat
2. Mengenai peraturan perundang-undangan dan peran masing-masing dari informan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari pihak kedua dan telah diolah atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan, data sekunder diperoleh melalui buku-buku literatur, dokumen serta website resmi Program PAMSIMAS, Sumber data yang sudah ada dan tersedia yaitu

1. Rencana kegiatan masyarakat 2014 dari pengelola BPSPAMS
2. Laporan fasilitas yang rusak PAMSIMAS
3. Laporan STBM dinas kesehatan

E. Teknik Pengumpulan

Data a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data atau informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti mengumpulkan dan meneliti data yang bersumber dari sejumlah dokumen, peraturan perundang-undangan, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan saling bertatap muka dengan informan. Peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada informan yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan mengenai permasalahan tentang Pamsimas sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yakni berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan. Penyajian data dengan deskriptif, hasil wawancara dan observasi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program PAMSIMAS tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Bupati sebagai penanggung jawab pelaksanaan PAMSIMAS. Program PAMSIMAS di tingkat desa memiliki beberapa tahap mulai dari tahap seleksi desa, perencanaan, pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan. Desa Banglas Barat salah satu desa sasaran program PAMSIMAS yang mana kondisi sarana akan akses pelayanan air minum dan sanitasi yang masih sangat rendah. Tahap program PAMSIMAS di Desa Banglas Barat yakni tahap perencanaan berupa identifikasi masalah dan analisis situasi dan pembentukan kelompok keswadayaan masyarakat, penyusunan RKM serta pemicuan perubahan hidup sehat. tahap pelaksanaan berupa pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan pembangunan sarana PAMSIMAS seperti tower air, kran umum, pemasangan perpipaan. Tahap operasional dan pemeliharaan berupa menjalankan distribusi air kemasyarakat pemanfaat dimana perbulannya masyarakat diwajibkan membayar Rp.10.000/ KK, namun tahun 2016 telah terjadi perubahan sistem dimana anggota pemanfaat PAMSIMAS harus memasang meteran air sehingga besar iuran dihitung Rp. 3000/M³.

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan program PAMSIMAS

1. Isi Kebijakan

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Pengelolaan PAMSIMAS di tahap perencanaan dan pelaksanaan program melibatkan banyak pihak mulai dari tingkat kabupaten, terbitkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 14/HK/KPTS/2016 perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 164 Tahun 2013 Tentang *Pembentukan Kelompok Kerja Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL)*, yang terdiri dari Dinas Pu Cipta karya sebagai instansi pembangunan di sektor fisik, Dinas Kesehatan beserta Puskesmas sebagai dinas terkait untuk melakukan pembangunan di sektor pembangunan non fisik seperti melakukan pemicuan ataupun

sosialisasi terhadap masyarakat, dan BAPPEDA sebagai pemberi arahan pembangunan, melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi program. Di tingkat Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan unit Pengelola seperti KKM,SATLAK,BPSPAMS yang berasal dari masyarakat dan dukungan bimbingan dari Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) yang terdiri dari tiga orang dengan bidang yang berbeda-beda satu orang Fasilitator bidang Teknik yang mendampingi dalam perencanaan dan pembangunan fisik sarana air minum dan sanitasi, satu orang Fasilitator bidang Pemberdayaan yang mendampingi masyarakat di bidang kelembagaan dan penguatan pada masyarakat, dan Fasilitator bidang STBM yang bekerja mendampingi masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b. Manfaat yang akan dihasilkan

Dengan adanya program PAMSIMAS tentu memberikan dampak positif terhadap kondisi masyarakat di Desa Banglas Barat. Pengelolaan PAMSIMAS pada tahap operasional dan pemeliharaan, melalui PAMSIMAS telah ada pendistribusian kebutuhan akan air bersih kepada masyarakat pada tahun 2015 kepada 100 KK yakni di Dusun Rintis 36 KK dan Dusun Bandar Suir 64 KK. Pada tahun 2016 sebanyak 54 KK kepada Dusun Rintis 11KK dan Dusun Bandar Suir 43 KK. terjadinya penurunan pemanfaat PAMSIMAS dikarenakan sarana yang di bangun berupa tower air PAMSIMAS tidak mampu untuk menjangkau rumah pemanfaat yang jauh dari tower air. Kondisi ini tentunya perlu dukungan tambahan akan sarana PAMSIMAS untuk dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Perubahan yang ingin dicapai melalui program PAMSIMAS tentunya selain dari pendistribusian air bersih ialah peningkatan akan sarana sanitasi serta perubahan perilaku hidup sehat

dimasyarakat terkhususnya untuk masyarakat miskin. Program PAMSIAMS di Desa Banglas Barat telah melakukan sosialisasi dan pemucuan yang dilakukan Dinas Kesehatan dan Puskesmas, namun hal ini hanya dilakukan pada tahap awal program PAMSIMAS tahun 2014 sehingga kondisi masyarakat belum mengalami perubahan dari segi perubahan perilaku hidup sehat.

Tabel 2 Laporan Status Kesehatan Desa Banglas Barat tahun 2015-2016

Jumlah			Jadwal	
KK	Dusun	Sekolah Dasar	Pemicuan	Update Terakhir
1059	4	2	16-09-2014	26-04-2016
Kondisi Status Desa Banglas Barat Belum ODF				

Sumber : Laporan Desa PAMSIMAS Dinas Kesehatan Tahun 2016

Data desa sasaran PAMSIMAS dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa Desa Banglas Barat belum Stop BABS atau ODF, hal ini disebabkan salah satu dusun di Desa Banglas Barat yakni Dusun Semulut berdekatan sungai sehingga kondisi kesehatan dan perilaku masyarakat kurang baik dimana masih adanya kondisi masyarakat buang air besar di sungai.

d. Letak pengambilan keputusan

Pengelolaan PAMSIMAS di Desa Banglas Barat terdapat sepenuhnya dikelola lembaga kemasyarakatan yang sebagai perpanjangan tangan masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat yakni KKM, SATLAK, dan BPSPAMS. Prosedur pelaksanaan program PAMSIMAS banyak tahapan-tahapan yang melibatkan masyarakat baik dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

Semua prosedur dalam pelaksanaan PAMSIMAS akan diselenggarakan oleh KKM dan Satuan Pelaksana (SATLAK) yang mana

sebagai perwakilan masyarakat Desa Banglas Barat. Kegiatan yang dilaksanakan KKM dan SATLAK akan di damping oleh Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) agar setelah program ini selesai masyarakat dapat mandiri dalam mengelola sarana yang dimilikinya. Mulai dari penyelenggaraan administrasi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sehingga setiap tahapan melibatkan masyarakat, karena masyarakat yang mengerti kondisi desanya, dan semua keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat antara masyarakat pemanfaat dengan lembaga pengelola PAMSIMAS didalam agenda acara rembuk warga. Hal ini tentunya membuat kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh POKJA AMPL.

e. Pelaksana program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan. Dalam tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan program PAMSIMAS, masyarakat berperan aktif dan ikut berpartisipasi sebagai selaku pelaksana dan di dampingi tim fasilitator masyarakat dan dilakukan pembinaan dan pelatihan kepada KKM, SATLAK, dan BPSPAMS seperti pelatihan teknik pengelolaan air, pelatihan administrasi dan keuangan. Namun setelah dilakukan penyerahan aset pada tahun 2015 dimana sepenuhnya kewenangan pengelolaan berada pada BPSPAMS terjadi permasalahan dimana anggota BPSPAMS tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan jaringan dan pemungutan iuran sehingga banyak fasilitas yang rusak seperti perpipaan, kran umum. Hal ini membuat pendistribusian air dan pemeliharaan sarana tidak dilakukan. Pada tahun 2016 dilakukan revitalisasi anggota pengelola PAMSIMAS yang lama, dimana terdapat 3 orang anggota BPSPAMS yang baru. Tentunya jumlah pengelola ini sangat sedikit dan tidak adanya bantuan pemeliharaan sarana yang dilakukan Pemerintah Desa.

f. Sumberdaya yang digunakan

Sumberdaya mencakup jumlah staff yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Secara SDM dalam pengelolaan PAMSIMAS di Desa Banglas Barat masih tergolong minim dimana pada tahap operasional dan pemeliharaan yang bertanggung jawab hanya BPSPAMS yang berjumlah tiga orang untuk melakukan pendistribusian air, pemungutan iuran dan pemeliharaan sarana. Sedangkan dari segi fasilitas program PAMSIMAS, sarana PAMSIMAS belum mampu menjangkau keseluruhan masyarakat pemanfaat dikarenakan jarak antara tower air PAMSIMAS dengan rumah warga jauh sehingga masyarakat yang jauh hanya mendapatkan sedikit air dan ketersediaan air baku yang terbatas, butuh waktu yang 6 - 8 jam untuk penuhkan bak air serta mesin air sanyo banyak yang rusak dari tahun 2015-2016 telah ada 5 mesin sanyo yang rusak.

2. Lingkungan Kebijakan**a. kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari actor-aktor terlibat**

Pengelolaan PAMSIMAS didukung banyak mulai dari tingkat Kabupaten hingga ketinggian Pemerintah Desa, karena program ini membawa dampak positif terlebih lagi untuk Desa Banglas Barat yang mana cakupan akan akses air bersih dan sanitasi masih rendah. Kepentingan program ini merupakan kepentingan bersama seperti pada pembangunan kran umum di beberapa tanah masyarakat yang mana pemakiannya diberikan untuk seluruh masyarakat tanpa ada pihak yang menguasai. Serta pemilihan pembangunan sarana PAMSIMAS seperti tower air, kran umum dan sarana CTPS telah dilakukan secara musyawarah antara lembaga pengelola dengan masyarakat yang disusun dalam Rencan Kerja Masyarakat (RKM).

b. Karakteristik lembaga dan rezim berkuasa

Pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Banglas Barat pada awal tahun 2014 tidak lepas dari dukungan Pemerintah Desa yang telah memfasilitasi dan di bantu oleh tim fasilitator dari Kabupaten dan Provinsi hingga Banglas Barat serta POKJA AMPL Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun setelah peresmian program PAMSIMAS tahun 2015 semua pengelolaan diberikan tanggung kepada BPSPAMS, sehingga semua kebijakan seterusnya diputuskan oleh BPSPAMS dan masyarakat pemanfaat. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan pengelola BPSPAMS dalam melakukan pemeliharaan sarana dan perbaikan fasilitas dimana telah terjadi kerusakan 1940 meter perpipaan pecah akibat proyek jalan pemerintah daerah dari total 3194 meter. Hal ini tanpa ada bantuan perbaikan dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

c. Kepatuhan dan daya tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap dari unsur pelaksana salah satunya dapat dilihat dari pelaksanaan sosialisasi kegiatan. Sosialisasi kegiatan merupakan tahapan penjelasan umum tentang implementasi peraturan kepada seluruh pihak yang berkepentingan bisa dilakukan melalui pendekatan teknik informasi dan teknik keterlibatan. Awal tahap program PAMSIMAS telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola dan masyarakat serta pemicuan kesehatan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Pengelolaan PAMSIMAS di Desa Banglas Barat secara teknik telah diatur dalam buku pedoman PAMSIMAS dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Dalam tahap operasional dan pemeliharaan tahun 2016 telah terbentuk peraturan bersama antara pengelola BPSPAMS dengan pemanfaat PAMSIMAS.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan PAMSIMAS di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan PAMSIMAS yakni ditinjau dari segi isi kebijakan faktor manfaat dan derajat perubahan yang ingin dicapai yang masih menjadi kendala, sedangkan dari segi lingkungan kebijakan peran Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah masih minim dalam melakukan dukungan dari segi materi serta pembangunan sarana PAMSIMAS yang belum mampu menjangkau keseluruhan masyarakat pemanfaat PAMSIMAS.

DAFTAR PUSTAKA

Buki-Buku

- Nugroho, Riant, 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Gramedia
- Patiliman, Hamid, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sujianto, 2009. *Pemberdayaan Menuju Masyarakat Mandiri*. Pekanbaru : Alfa Riau
- , 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Praktek*. Pekanbaru : Alfa Riau

Strauss, Anselm & Corbin Juliet. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Winarno, Budi . 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta :CAPS

Skripsi :

Al Ikhlas. 2014. Pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Tahun 2012. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pekanbaru

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 14/ HK/KPTS/I/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan B u p a t i Kepulauan Meranti Nomor 164 T a h u n 2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Air Minun d a n penyehatan Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti.

